PENGUNGSI, KONSTITUSI: NALAR DISKURSIF HUKUM

Marluwi

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak

Email: mar.luwi@yahoo.com

Abstrack

Social conflict engenders refuges. There must be a law or a rule to manage refuges. It is aimed at protecting every citizen rights as written in preamble of UUD 1945: "*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*". Pancasila, UUD 1945, law number 39, year of 1999 about human rights and law number 40, year of 2008 about annulment of races and ethnics discrimination are four foundations that should be the basis of regulation to protect refugees rights as victims of social conflict.

Abstrack

Konflik sosial dengan ikutan adanya pengungsi khususnya pengungsi korban konflik sosial di tanah air. Diperlukan suatu payung hukum, aturan, atau regulasi *konstitusif* yang mengatur spesifik masalah pengungsi. Hal ini tak lain dimaksudkan upaya menjaga, menjamin serta melindungi hak-hak sipil setiap warga negara, seperti tertera dalam amanah UUD Tahun 1945: "*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*". Pancasila, UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Keempat *logic* ini seyogianya menjadi dasar-dasar serta argumen pemula pentingnya regulasi hukum perlindungan hak-hak pengungsi korban konflik sosial.

Catatan Awal

Bunyi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, antara lain mengatakan: "*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*".

Kemerdekaan mengandung makna ketersediaan. Antara lain ketersediaan jaminan akan hak hidup setiap warga negara, tiadanya penganiayaan, penindasan dan semacamnya. Dalam strata sosial mana pun hak hidup dan seterusnya tersebut kebutuhan asasi serta tidak boleh tertunda. Mengenai hak hidup ini, agaknya penting untuk perhatikan "permulaan" berikut:

Hak-hak asasi yang tidak boleh dilanggar tersebut meliputi: the rights to life, the freedom from torture and other ill treatment, the freedom from slavery servitude, and the imposition of retroactive final laws. Dewasa ini hak-hak tersebut berkembang dengan ditambahkan beberapa hak yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apa pun, yaitu hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang (arbitrary arrest), hak atas peradilan yang bebas dan tidak memihak (fair and impartial trial), hak atas bantuan hukum (legal assistance), hak atas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan beberapa hak lain.¹

Mengenai the rights to life ini, pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan: “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Dari pasal ini terdapat premis obyektif mengenai hak hidup setiap warga negara tanpa kecuali. Dalam bentuk adanya jaminan dan perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dapat diletakkan sebagai mainstream konstitusional dan koridor normatif dalam upaya mewarta, menjaga serta memelihara kemanusiaan universal. Melalui undang-undang ini, setidaknya menjadi titik awal, kanal serta “pintu” masuk dalam memotret pengungsi korban konflik sosial melalui kran yuridis normatif.

Tentu tidak hanya berpusat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Di atasnya adalah Pancasila dan UUD Tahun 1945. Pada keduanya ini, baik Pancasila dan UUD Tahun 1945 merupakan dasar-dasar hukum, argumen serta landasan hukum di tanah air. Tegasnya, Pancasila dan UUD Tahun 1945 merupakan epistemologi dalam ber hukum, berpolitik, termasuk dalam hidup berbangsa bernegara di tanah air. Atau lebih tepatnya Pancasila dan UUD Tahun 1945 dapat diletakkan sebagai modal historis, pandangan hidup, tata cara atau modul dalam berbagai cakup hidup berbangsa, bernegara: Indonesia.

Harus diakui, sampai saat ini republik Indonesia belum memiliki aturan atau regulasi hukum spesifik yang mengatur komprehensif tentang pengungsi korban konflik sosial di tanah air. Lewat tulisan kecil ini saya “hanya” mencoba membangun (sumbangkan) logika hukum serta argumen mengenai pentingnya Rancangan Undang-

¹Hal ini pandangan Todung M. Lubis yang dikutip Bahder Johan Nasution, lihat lebih lanjut *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju. 2012), cet. ke-2, 246.

Undang Pengungsi Korban Konflik Sosial (RUU PKKS) berdasarkan arus utama: Pancasila, UUD Tahun 1945 dan ketentuan hukum atau undang-undang yang ada. Mengenai hal ini, sedikitnya ada lima hal perlu diuraikan lebih dahulu sebagai berikut di bawah ini.

Konflik

Mengenai konflik, seperti saya kutip dari tulisan Samsu Rizal Panggabean.² Dalam tulisannya disebutkan beberapa term konflik tersebut:

1. A Situation of competition in which the parties are aware of the incompatibility of potential future positions and in which each party wishes to occupy a position that is incompatible with the wishes of the other.
2. A social conflict exist when two or more parties believe they have incompatible objectives.
3. Social conflict refers to a situation in which parties believe that they have incompatible goals.

Tak hanya berhenti pada terma-terma konflik, seperti telah disebutkan di atas. Ada variabel lain dan perlu diberikan nilai, variabel lain tersebut tak lain adalah masalah sosial. Mengenai hal ini, Soetomo³ memaknai serta memberi definisi masalah sosial berikut ini: "...sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Hal itu disebabkan karena gejala tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan nilai, norma dan standar sosial yang berlaku".

Pada poros lain, menurut Parrillo seperti dikutip Soetomo, yang menyebutkan masalah sosial selalu mengandung (memiliki) empat komponen, meliputi: (1) kondisi tersebut merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu; (2) dirasakan dapat menyebabkan berbagai kerugian fisik atau nonfisik, baik pada individu maupun masyarakat; (3) merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial

² Makalah tersebut berjudul *Negara Dan Kekerasan Subnasional*, yang dibentangkan dalam seminar: *Peran Negara dalam Resolusi Konflik: Transformasi Konflik Menuju Indonesia Baru*, Yogyakarta, 18 November 1999.

³ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010), cet. ke-2, 1.

dari salah satu beberapa sendi kehidupan masyarakat; (4) menimbulkan kebutuhan akan pemecahan.

Artinya konflik itu terjadi tidak berdiri sendiri. Selalu ada variabel lain dalam hal ini yaitu masalah sosial. Dengan adanya masalah sosial itu kemudian akan memantikkan, memberikan daya picu adanya konflik.

Berkenaan dengan konflik, tentu tidak cukup menilai dengan mata negatif. Karena konflik tidak selalu berakhir negatif. Dapat saja konflik yang ada (baik bersifat individual-sosial) menjadi pendorong terjadinya perubahan konstruktif, saling memperkuat, terjadinya negosiasi sosial, saling menyuplai satu sama lain ke arah pemajuan bersifat konstruktif.

Mestinya semisal ini konflik dibangun, diciptakan, diarahkan, dimajukan. Untuk terus-menerus melakukan negosiasi sosial, saling memperkuat, serta menjadi sarana konstruktif. Perubahan-perubahan sosial seperti ini yang diperlukan. Di mana konflik mengambil menu: pendorong ke arah lebih baik dan memajukan sosial. Bukan sebaliknya, konflik merusak, berakhir dengan luka dan duka bahkan terjadinya pengungsian warga negara dari satu tempat ke tempat lain. Berkenaan dengan pengungsi, selanjutnya akan dijelaskan pada sub bahasan berikut di bawah ini.

Pengungsi

Berkenaan dengan pengungsi, sedikitnya diberikan makna seperti berikut:

*As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to wellfounded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.*⁴

Adapun dalam panduan komisi nasional hak asasi manusia menyebutkan pengungsi:

“...adalah seseorang yang melewati batas suatu negara karena alasan politik dan tidak mendapatkan perlindungan di negaranya sendiri sehingga harus pergi keluar negaranya untuk mendapatkan perlindungan tersebut. Sementara itu, dalam hal ‘pengungsi internal’, pengungsian

⁴ UNHCR, *Handbook On Procedures And Criteria For Determining Refugee Status*, (Geneva: Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law. 1992), 11.

terjadi di dalam wilayah negaranya karena bencana alam, pelanggaran hak asasi manusia, konflik, dan penganiayaan. Kemudian, pengungsi internal juga mendapatkan perlindungan dari negaranya (pemerintah)”⁵.

Pada perspektif berbeda pengungsi disebut:

“...orang-orang atau kelompok-kelompok yang telah dipaksa atau diharuskan untuk meninggalkan tempat tinggal yang biasa didiami, sebagai akibat dari atau untuk menghindari akibat dari konflik bersenjata, situasi kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, bencana alam atau buatan manusia, dan belum melintasi perbatasan negara yang diakui secara internasional.”⁶

Beberapa kutipan mengenai term pengungsi di atas, dapat dipahami pengungsi tak lain yakni mereka yang menjadi obyek kekerasan, penganiayaan diikuti terampasnya hak-hak dasar kemanusiaan sehingga harus pergi menyelamatkan diri. Atau karena bencana alam dan hal-hal lainnya.

Jika merujuk kepada buku *The State of the World’s Refugees: The Challenge of Protection* (UNHCR: 1993). Ada empat sebab orang menjadi pengungsi. Karena: (1) political roots, (2) economic roots, (3) environmental roots dan (4) ethnic tensions. Keempat hal ini semacam “tori-tori” yang hendak ingatkan bahaya laten dan potensi konflik di belahan bumi mana pun. Pada sisi lain pengungsi diklasifikasi seperti berikut di bawah ini:

Pengungsi internal:	Pengungsi:
Definisi pengungsi internal bersifat lebih luas, dan termasuk bencana yang disebabkan oleh alam maupun yang disebabkan oleh manusia.	Persyaratan untuk menjadi pengungsi berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 bersifat tepat dan terbatas, yaitu harus ada rasa takut akan pengejaran/penganiayaan yang beralasan dan rasa takut tersebut harus berhubungan dengan salah satu dari alasan-alasan yang tercantum di dalam Konvensi tersebut.
Pengungsi internal tetap berada di dalam wilayah negaranya.	Seseorang menjadi pengungsi ketika ia melintasi batas wilayah internasional.
Status hukum pengungsi internal tidak memiliki dokumen legal internasional	Status hukum pengungsi diatur dalam suatu dokumen legal internasional yang mengikat

⁵ Gusrini Tambunan dkk., *Suatu Manual: Prinsip-Prinsip Panduan bagi Pengungsi Internal dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Komnas HAM. 2007), 6.

⁶ Gusrini Tambunan (ed.), dkk., *Perspektif HAM Dalam Pemenuhan Hak IDPs (Penelitian awal dalam tinjauan Ekosob dan Sipol)*, (Jakarta: Komnas HAM. tt), 15.

yang bersifat mengikat secara hukum.	secara hukum.
Sebagai pengungsi internal, seseorang tidak memiliki hak tambahan. Dalam hal ini, pengungsi internal memiliki hak-hak yang sama seperti warga negara lain di negara yang bersangkutan.	Status pengungsi memberikan individu yang bersangkutan hak-hak tertentu.

Laman Hukum Islam

Beberapa pengertian dan klasifikasi pengungsi telah disebutkan di atas. Argumentasi lanjutan adalah bagaimana pengungsi dapatkan legal, dasar-dasar hukum mengenai hak-hak sipil mereka. Baik berkenaan perlindungan hak hidup dan seterusnya. Dalam koridor hukum Islam, apa yang ditulis Rachmat Syafe'i di bawah ini agaknya menjadi pintu masuk:

Salah satu bentuk ajaran yang menampilkan universalitas Islam adalah adanya lima jaminan dasar (مقاصد الشريعة atau الخمسة الضرورية) yang diberikan oleh hukum agama samawi terakhir ini kepada umat manusia, baik secara perorangan maupun sebagai komunitas. Kelima jaminan dasar yang tersebar dalam berbagai literatur klasik tentang hukum agama (*al-kutub al-fiqhiyah*) itu adalah: (1) Keselamatan keyakinan agama semua orang tanpa adanya paksaan untuk berpindah agama (حفظ الدين), (2) Keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum (حفظ النفس), (3) Keselamatan akal (حفظ العقل), (4) Kehormatan keluarga dan keturunan (حفظ النسل), (5) Keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum (حفظ المال).

Secara keseluruhan, kelima jaminan dasar di atas menampilkan universalitas pandangan hidup yang utuh dan integral. Jika ada suatu pemerintahan yang berdasar hukum, menjunjung tinggi persamaan derajat, tenggang rasa terhadap pandangan dan keyakinan, berarti ia telah mengangkat unsur-unsur utama kemanusiaan, dan pada gilirannya telah menampilkan universalisme ajaran Islam.⁷

Secara moral-normatif, *kaidah-kaidah* moral ditunjukkan Rachmat Syafe'i tentang kebebasan memeluk keyakinan beragama dan seterusnya tersebut. Hal ini menandakan betapa Islam memberikan ruang gerak kemerdekaan atas siapa pun untuk memeluk agama, Islam tidak mengenal, dan tidak mengajarkan pemaksaan dalam hal berkeyakinan terhadap Tuhan, Sang pemilik hamba dan alam semesta ini. Setidaknya dari *al-kutub al-fiqhiyah* ini menjadi *kran* moral-sosial, terutama dalam hal menjamin

⁷ Rachmat Syafe'i, *Asas Retroaktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, pidato pengukuhan Guru Besar Madya Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 21 September 2002, hlm. 5-6.

dan melindungi hak-hak dasar kemanusiaan termasuk di dalamnya pengungsi korban konflik sosial.

Artinya pemulyaan dan perlindungan terhadap manusia sesuatu yang asasi dan pokok. Tiada alasan apa pun manusia satu sama lain saling mendistorsi, mereduksi melalui cara-cara yang jauh nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip-prinsip hukum Islam kemukakan Juhaya S Praja⁸ seperti prinsip tauhid, keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, kemerdekaan dan kebebasan, persamaan, tolong-menolong, dan toleransi.

Beberapa prinsip hukum Islam telah sebutkan di atas, seyogianya menjadi *jurisdiksi* dan etika dalam upaya menjamin dan melindungi hak-hak dasar setiap manusia antara lain hak hidup, demikian halnya kepada mereka tiap-tiap orang yang mengungsi karena bencana alam atau korban konflik sosial. Dari sisi hukum Islam, tidak ada alasan manusia satu sama lain lakukan subordinasi atau tindakan-tindakan tidak terpuji kepada sesama. Sebaliknya, prinsip-prinsip hukum Islam tersebut seyogianya membuka jalan adanya kemaslahatan sosial umat manusia universal. Kemaslahatan tak cukup sebagai teks atau teori yang menjadi kekayaan khazanah *an sich*, namun sebaliknya menjadi keharusan sosial yang mewujudkan-menyata dalam praktik hidup.

Kemaslahatan dengan segala aspeknya, seperti keadilan, kesamaan, kesederajatan, kebebasan, kedamaian, kesejahteraan, dan kemudahan hidup adalah kondisi ideal yang harus dibentuk sebagai cerminan bahwa Islam adalah agama kasih sayang yang senantiasa sesuai dengan segala tempat dan waktu.⁹ Oleh karena itu, Islam tidak dapat dipahami terpisah dari kekuatan unik yang menggerakkannya, yakni kekuatan firman Tuhan yang kreatif di dalam jiwa, masyarakat, dan sejarah manusia, maka Islam terus tumbuh dan meluas serta membuat kemajuan.¹⁰ Dalam konteks inilah kekuatan dan kemaslahatan firman Tuhan harus terus-menerus dicari dan ditemui oleh manusia dalam kontekstualitas sejarahnya, khususnya umat Islam dan menjadi praktik nyata dalam hidup sehari-hari.

Kemaslahatan dan segala macam yang dekat dengannya, termasuk keadilan dan hal-hal lain yang senyawa dengannya. Seyogianya menjadi alat ukur serta teraktualisasi pada paras kehidupan sosial. Kehadiran Islam dan hukum-hukum-Nya tak lain

⁸ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM UNISBA. 1995), hlm. 69-78.

⁹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS. 2012) cet. ke-1, hlm. 256.

¹⁰ Issa J. Boullata, *Dekonstruksi Tradisi Gelegar Pemikiran Arab Islam*, (Yogyakarta: LKiS. 2001), hlm. 101.

dimaksudkan menjadi jalan lurus dan kebaikan manusia itu sendiri. Semua manusia terlindungi oleh hukum-hukum-Nya, semua aturan hukum-Nya menjadi normatif di mana semua umat manusia harus tunduk, taat dan patuh kepada-Nya. Prinsip-prinsip hukum Islam telah disebutkan, seyogianya menjadi suatu dasar-dasar dan kerangka sosial upaya menjaga, menjamin dan melindungi hak-hak dasar manusia universal termasuk pengungsi korban konflik sosial.

Setidaknya beberapa uraian dari aspek hukum Islam ini dapat menjadi argumen historis dalam kaitannya dengan pengungsi sekaligus melindungi hak-hak sipilnya.

Laman Hukum Negara

Indonesia sebagai negara hukum berdasar Pancasila dan UUD Tahun 1945. Dalam konteks ini Pancasila dan UUD Tahun 1945 menjadi modal utama dalam upaya memberikan jaminan atau perlindungan hak-hak dasar pengungsi atau lebih luas seluruh warga negara di republik ini. Betapa pun setiap orang perlukan rasa aman, nyaman dari berbagai tindakan atau perilaku bahaya yang dapat mengancam keselamatan dirinya, keluarga dan seterusnya. Secara sosial kolektif dalam hidup berbangsa bernegara tentu ini kebajikan di tengah-tengah kemajemukan suku bangsa. Tegasnya, rasa aman dan nyaman merupakan kebutuhan sosial kolektif seluruh rakyat Indonesia dan umumnya manusia di belahan bumi mana pun.

Pada *aras* inilah diperlukan, yakni ketersediaan rasa aman, nyaman serta tersedianya keterlindungan sosial kolektif bagi seluruh warga negara. Akan tetapi secara yuridis-normatif problem hukum terkait dengan pengungsi korban konflik sosial di tanah air. Harus diakui hingga saat ini belum memiliki *laman* hukum negara. Selama ini terkait pengungsi korban konflik sosial yang menjadi epistemologi hukumnya berpijak kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Sementara pada kedua undang-undang tersebut tidak satu pasal ditemukan *ontologi* siapa dimaksud pengungsi korban konflik sosial dan bagaimana pengungsi tersebut diatur dalam undang-undang. Karena itu perlu terobosan atau upaya-upaya (ijtihad) hukum untuk menemukan hukum pengungsi dalam hal ini yakni perlunya regulasi hukum pasti, yang secara spesifik dan detail mengatur serta merumus aturan-

aturan hukum yang menjamin dan melindungi pengungsi korban konflik sosial serta hak-hak sipilnya.

Pancasila, UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Keempat *logic* ini seyogianya menjadi dasar-dasar serta argumen pemula, pentingnya dan kebutuhan regulasi hukum tentang pengungsi korban konflik sosial di tanah air tercinta.

Undang-Undang Pengungsi

Berkenaan dengan pengungsi korban konflik sosial baik pengungsi yang ada di tanah air atau pun pengungsi di belahan bumi (di beberapa negara lain). Ada satu hal perlu menjadi *lokus* perhatian, dengan titik tekan keniscayaan perlu adanya jaminan atau perlindungan kepada pengungsi itu sendiri. Tentang hal ini, agaknya sesuatu yang *given*, penting, dan perlu. Jika selama ini memang belum terpikir sama sekali, atau belum menjadi suatu aksi sosial yang nyata dari aspek *legal* hukum.

Fakta *nan* historis adanya pengungsi di beberapa belahan negara lain pada akhir-akhir ini. Seyogianya menjadi “mata” dan “logika” hukum pentingnya (keterbutuhan) regulasi atau undang-undang yang mencatat dan mengatur komprehensif pengungsi serta dan hak-hak dasar pengungsi. Kenapa ini penting? Tak lain, semata-mata untuk melindungi seperti halnya tentang hal-hal lain di mana semua aspek seyogianya harus dilindungi oleh hukum, oleh konstitusi. Termasuk dalam hal ini pengungsi korban konflik sosial.

Bagi saya, hukum itu harus responsif serta proaktif seiring gerak-gerik gejala atau realitas sosial empirik. Dalam arti kata, realitas sosial dengan berbagai bentuk-wujudnya serta adanya keterlibatan manusia di dalamnya. Hukum harus hadir memberikan nalar kepastian terhadap gerak-gerik gejala atau realitas sosial empirik di mana ada keterlibatan aktor, dalam hal ini manusia. Artinya, hukum tidak boleh abai dalam denyut dinamika aktual manusia, dalam kehidupan yang dijalani manusia.

Karena itulah, realitas sosial adanya pengungsi karena konflik sosial. Maka perlu suatu “dalil” atau aturan atau regulasi hukum yang mengatur tentang pengungsi. Dalam konteks ini, kebutuhan regulasi hukum perlindungan hak-hak pengungsi korban konflik sosial. Khususnya hak-hak pengungsi korban konflik sosial di tanah air. Dalam konteks ini, setidaknya bisa kita mulai secara sistematis kepada berikut di bawah ini:

Pertama, Pancasila. Seperti yang kita ketahui sila-sila (sila ke-1 sampai sila-5) dalam Pancasila. Di dalamnya sekurang-kurangnya menyimpan dua hal, yakni semangat berkenaan ketuhanan (*teologikal*) dan sosial kemanusiaan (*humanikal*).

Kedua, UUD Tahun 1945. Undang-undang ini semacam *darah-daging* kebangsaan, kenegaraan Indonesia. UUD Tahun 1945 menjadi haluan, panduan historis perjalanan bangsa hingga saat ini. Ia juga semacam dalil, tidak pernah, dan tidak boleh *lejang* dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Artinya keberadaan UUD Tahun 1945 dalam ke-Indonesia-an sangat *konstitusif*, di mana di dalam UUD Tahun 1945 banyak sekali nilai-nilai dapat diambil bagi kemanusiaan aktual.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini banyak berisi hal-hal pokok dengan obyek dan *optic* utamanya manusia. Secara substansial undang-undang ini mengelaborasi mengenai hak dan manusia sebagai kunci dan pokok.

Keempat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Undang-undang ini ber-ikhtisar pokok kepada tiga hal, yakni: mulai dari *ontologi* diskriminasi, ras dan etnis.

Apa yang saya sebutkan empat hal di atas, keempat-empatnya penting serta diperlukan dalam upaya *pembentukan hukum*; undang-undang perlindungan hak-hak pengungsi korban konflik sosial. Keempat hal di atas sebagai *magma* moral serta *panggung* yuridis bagi “kelahiran” undang-undang perlindungan hak-hak pengungsi korban konflik sosial.

Empat butir ini: yakni Pancasila, UUD Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 40 Tahun 2008. Keempatnya tersebut seyogianya menjadi epistemologi, pijak, dasar serta *ontologi* “kesadaran” yuridis kelahiran undang-undang perlindungan hak-hak pengungsi korban konflik sosial.

Kebutuhan akan undang-undang berkenaan dengan perlindungan hak-hak pengungsi korban konflik sosial, sedari awal tentu diperlukan analisis-akademik yang berdasar-pijak realitas sosial-temporer. Serta juga diperlukan nalar-kritis, debat terbuka: diskursif “telanjang” agar dapat diketahui publik luas pentingnya undang-undang dimaksud.

Kebutuhan regulasi hukum: undang-undang perlindungan hak-hak pengungsi korban konflik sosial. Sekali lagi, perlu diberikan ruang debat yang lebar dan seluas-

luasnya, dikritisi lewat nalar obyektif penting atau tidaknya undang-undang yang berkenaan dengan pengungsi korban konflik sosial tersebut.

Catatan Akhir

Konflik sosial dengan ikutan adanya pengungsi khususnya pengungsi korban konflik sosial di tanah air. Diperlukan suatu payung hukum, aturan, atau regulasi *konstitusif* yang mengatur spesifik masalah pengungsi tersebut. Hal ini tak lain dimaksudkan upaya menjaga, menjamin serta melindungi hak-hak sipil setiap warga negara, seperti tertera jelas dalam amanah UUD Tahun 1945 seperti saya kutip pada awal tulisan dan di akhir tulisan berikut ini: “*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*”.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS. 2012).
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju. 2012).
- Gusrini Tambunan (ed.) dkk., *Perspektif HAM Dalam Pemenuhan Hak IDPs (Penelitian awal dalam tinjauan Ekosob dan Sipol)*, (Jakarta: Komnas HAM. t.t).
- Gusrini Tambunan dkk., *Suatu Manual: Prinsip-Prinsip Panduan bagi Pengungsi Internal dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Komnas HAM. 2007).
- Issa J. Boullata, *Dekonstruksi Tradisi Gelegar Pemikiran Arab Islam*, (Yogyakarta: LKiS. 2001).
- Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM UNISBA. 1995).
- Marluwi, *Perlindungan Hak-Hak Pengungsi Dalam Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Serta Implementasinya Bagi Penanganan Pengungsi Konflik Sosial Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat*, (Bandung: Disertasi Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Bandung, 2015).
- Rachmat Syafe'i, *Asas Retroaktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, pidato pengukuhan Guru Besar Madya Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 21 September 2002.

Samsu Rizal Panggabean, *Negara Dan Kekerasan Subnasional*, makalah seminar: *Peran Negara dalam Resolusi Konflik: Transformasi Konflik Menuju Indonesia Baru*, Yogyakarta: 18 November 1999.

Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010).

UNHCR, *Handbook On Procedures And Criteria For Determining Refugee Status*, (Geneva: Raoul Wallenberg Institute of Human.